

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agus Riewanto, dkk , 2023, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Burhan Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Denny Indrayana, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 : An Evaluation of Constitution Making in Transition*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pusat Utama, Jakarta
- Efriza, 2009, *Ilmu Politik dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung
- Fatahullah Jurdi, 2014, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Firdaus A dan Fabian R, 2019, *Penjabat Kepala Daerah*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- Indra Ismawan, 2002, *Otonomi Ranjau Ranjau Daerah*, Pondok Edukasi, Solo
- J. Salusu, 1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik : Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: telaah perbandingan konstitusi berbagai negara*, UI Press, Jakarta
- _____, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- _____, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna, Jakarta
- _____, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,

Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Poerwasunata, W.J.S, 2003 Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Samsul Wahidi, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunarso, 2013, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Ombak, Yogyakarta

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota



C. Jurnal

Akhmad Marwi, "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016)

Fabian Riza Kurnia dan Rizari, 2019. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana" : Vol 11, No.2

M Alifudin Al Islami dan Moh Agung Surianto. Analisis Kekosongan Jabatan Guna Mengoptimalkan Kinerja Karyawan Perumda Bank Gresik. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, Vol. 3 No 2 2022,

Mardin, Faharudin dan La Ode Muhaimin, Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Indonesia, *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol.4, No.1, Juni 2024, hlm 3-4.

M. Suryani, "Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Padang)," *Madania: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2 (2023).

Sulardi, Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, *Jurnal Konstitusi* Volume 9 (3) 2012, hlm 516

Pujangga Candrawijyaning Fajri, "Refomulasi Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagai Upaya Penguatan Sistem Demokrasi" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 2, December 2023

Rahmazani, Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024, *Jurnal Konstitusi Volume 20 (2) 2023*

Rismahayani Rismahayani dan Aprinelita Aprinelita, “Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024,” *Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1 (2023)

Sulardi, Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, *Jurnal Konstitusi Volume 9 (3) 2012*, hlm 516

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010*.

D. Sumber Lain-Lain

Binews.id, *Andree Algamar Jadi Plh Wali Kota Padang, Ini Pesan Ekos Albar*, diakses pada 15 April 2025 dari: <https://binews.id/berita/17241>.

Renie Aryandani, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renie-aryandani--sh-lt65b2478d34e0c/>

Stefanus Sampe, 2022, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, <https://repo.unsrat.ac.id/4569/1/Buku%20Perbandingan%20Sistem%20Pemerintahan-1.pdf>

